

BAB II

PERAN UNIFEM DALAM UPAYA MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK DARFUR

2.1. UNIFEM SEBAGAI AKTOR

Archer menyebutkan bahwa organisasi internasional dapat memiliki peran sebagai aktor independen ketika suatu organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan serta melakukan tindakan secara langsung tanpa ada pengaruh dari pihak lain di luar organisasi internasional (Archer, 1983). Hal yang menandakan bahwa UNIFEM memiliki peran sebagai organisasi internasional tergambar ketika UNIFEM mulai merespon angka kekerasan seksual terhadap perempuan yang semakin meningkat sejak terjadinya konflik pada tahun 2003. Sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat untuk mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan hak asasi manusia, UNIFEM telah menjalankan beberapa program untuk memenuhi mandatnya. Wilayah rawan konflik serta rawan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, menjadi sorotan utama UNIFEM dalam setiap program yang mereka jalankan. UNIFEM telah memasuki wilayah Afrika Timur sejak tahun 1994, satu wilayah diantaranya adalah Sudan. Sejak hadirnya di wilayah Afrika Timur, UNIFEM telah mendukung pencarian keadilan dan perdamaian bagi perempuan khususnya di wilayah Sudan yang termasuk ke dalam wilayah rawan konflik dan rawan kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan.

Pada bulan April 2005, UNIFEM melakukan kerjasama dengan *Joint Assessment Mission* (JAM) yang juga didukung oleh PBB serta World Bank dalam

konferensi di Oslo, Norwegia. Konferensi yang diadakan di Oslo ini membahas mengenai negara donor untuk Sudan dan juga menuntut agar memberlakukan tindakan untuk perempuan Sudan dengan fokus terhadap beberapa bidang yaitu; Pemerintahan dan hukum, *Gender Based Violence* (GBV), meningkatkan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, kebijakan ekonomi dan manajemen, mata pencaharian dan sektor produktif, serta pelayanan sosial (UNIFEM, 2005). Dalam pertemuan tersebut, UNIFEM diberikan mandat untuk memimpin kegiatan serta membentuk tim ahli gender untuk JAM. Kemudian, tim ahli yang sudah terbentuk akan menjalankan tugasnya sebagai komunikator yang akan berkomunikasi langsung dengan perempuan-perempuan dan anak-anak untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus mereka. Melalui komunikasi langsung dengan perempuan, misi lapangan secara ekstensif, serta analisis isu penting bagi perempuan, para ahli gender mengembangkan suatu analisis, rekomendasi, serta anggaran responsif bagi perempuan di kamp-kamp pengungsian Darfur dan Sudan. Konferensi ini dibiayai oleh Kementerian Luar Negeri Norwegia dan dihadiri oleh lebih dari 50 perempuan. mereka merupakan perwakilan dari masyarakat sipil, organisasi perempuan baik dari Sudan maupun Sudan selatan, lembaga akademis, serta delegasi dari pemerintah Sudan dan Sudan Selatan (UNIFEM, 2005). Perempuan yang hadir pada konferensi tersebut menyerukan pendekatan anggaran responsif gender dari anggaran donor serta mengamati tantangan sehari-hari yang dihadapi oleh perempuan. Perempuan yang hadir dalam konferensi tersebut juga menegaskan solidaritas kepada perempuan Darfur dan mengancam aksi GBV yang terjadi serta

menuntut agar perempuan Darfur diikutsertakan dalam proses perdamaian yang akan dipimpin oleh Uni Afrika untuk Darfur.

Sebulan setelah diadakannya konferensi Oslo, tepatnya pada bulan Mei 2005 agenda dari konferensi Oslo dilanjutkan dengan diadakannya pertemuan persetujuan Sudan yang dilaksanakan juga di Oslo. Pada pertemuan ini membahas empat hal yang menjadi prioritas untuk perempuan Sudan, yaitu (UNIFEM, 2005);

1. Mengupayakan jalur cepat untuk mengatasi daerah-daerah yang mana perempuan mengalami krisis pembangunan paling serius.
2. Memprioritaskan kepemimpinan perempuan.
3. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi perempuan dalam masyarakat.
4. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan negara donor untuk perempuan.

Kedua pertempuran yang dilaksanakan di Oslo tersebut kemudian menghasilkan dua rancangan kerja dalam dokumen program UNIFEM, yaitu; *“Protecting and Promoting Women’s rights and Leadership in Sudan”* (2005-2006) dan *“Gender Justice in Sudan”* (2005-2008). Kedua program tersebut dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2005 hingga bulan Juli 2008 dengan menggunakan dana yang berasal dari pemerintah Swedia dan Norwegia. Kedua program tersebut berfokus kepada merealisasikan komitmen kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai wilayah di Sudan termasuk Darfur. (Webb, 2008)

Dari pemaparan tindakan yang dilakukan oleh UNIFEM di Darfur, UNIFEM tidak memiliki peran organisasi internasional sebagai arena, karena konflik Darfur merupakan konflik internal Sudan dan segala bentuk perundingan yang dilakukan oleh UNIFEM berada di luar organisasi. Clive Archer menjelaskan bahwa peran organisasi internasional sebagai arena terjadi ketika suatu negara yang memiliki permasalahan atau konflik melakukan suatu perundingan di dalam organisasi dan kemudian mencari mencari jalan keluar bersama anggota organisasi lainnya (Archer, 2001). Hal tersebut tidak tergambar dalam tindakan yang dilakukan oleh UNIFEM karena perundingan yang terjadi di Oslo merupakan inisiatif dari PBB dan UNIFEM itu sendiri tidak ada keterlibatan dari Sudan yang merupakan anggota dari UNIFEM. UNIFEM juga tidak memenuhi kategori peran organisasi internasional sebagai instrumen karena UNIFEM memiliki kedudukan lebih tinggi dari negara anggotanya, Archer dalam bukunya menyebutkan bahwa suatu organisasi internasional dapat dikategorikan memiliki peran sebagai instrumen ketika organisasi tersebut dapat dikendalikan oleh kebijakan suatu negara anggotanya (Archer, 2001). Contoh organisasi internasional yang masuk dalam kategori ini adalah World Trade Organization (WTO).

Dalam menjalankan perannya sebagai aktor independent, UNIFEM membuat dua program, yaitu: *“Protecting and Promoting Women’s rights and Leadership in Sudan and Gender Justice in Sudan (2005-2008)”* dan program *“Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur (2008-2010)”*.

2.1.1. Program “*Protecting and promoting women’s rights and leadership in Sudan and Gender Justice in Sudan (2005-2008)*”

Program pertama yang dijalankan oleh UNIFEM ini secara umum memiliki dua tujuan, yaitu; (1). Melakukan advokasi dengan negara-negara donor, memperkuat kemitraan dengan berbagai institusi guna mempromosikan hak-hak dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam masa konflik dan pasca-konflik di Sudan dengan kepemimpinan perempuan. (2). Membangun kapasitas organisasi perempuan (Webb, 2008). Darfur yang waktu itu menjadi wilayah yang paling rentan akan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan mendapatkan perhatian penting dari program ini. Berbagai upaya dan kegiatan dilaksanakan guna mengurangi angka kekerasan fisik dan psikis yang terjadi akibat konflik.

Dalam melaksanakan program ini, UNIFEM bekerjasama dengan beberapa mitranya seperti UNFPA, UNDP, *United Nations Missions in Sudan (UNMIS)*, *African Union (AU)*, organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) baik internasional maupun lokal, dan juga masyarakat sipil guna menyoroti isu perempuan di berbagai wilayah Sudan. Dengan menggerakkan perempuan secara langsung dalam memperjuangkan hak mereka, UNIFEM memiliki beberapa fokus pada beberapa hal seperti yang sudah dibicarakan pada konferensi Oslo untuk perempuan Sudan dan prioritas utama untuk perempuan Darfur, mempromosikan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan memberikan dukungan akan lahirnya kebijakan dan reformasi hukum yang kemudian akan melindungi perempuan, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai *Violence Against Women (VAW)* yang kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai

VAW, serta memberikan bantuan pelayanan bagi korban kekerasan dan meningkatkan partisipasi perempuan baik dalam pemerintahan maupun dalam pengambil keputusan lain. (Webb, 2008)

Pada bulan Oktober 2005 dimana merupakan tahap awal pelaksanaan program ini, UNIFEM dan pemerintah Swedia menandatangani perjanjian untuk mendanai program ini sebesar 1,2 juta USD, selain Swedia pemerintah Norwegia juga memberikan dana sebesar 450.000 USD untuk program ini (Webb, 2008). Dana yang sudah diberikan oleh pemerintah Swedia dan Norwegia ini diharapkan dapat mendukung upaya UNIFEM dalam programnya melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan dan juga upaya kesetaraan gender. Program ini menyasar kepada perempuan dewasa maupun anak-anak yang tersebar di berbagai kamp-kamp pengungsian seperti yang berada di Khaortum maupun di wilayah Darfur lainnya baik bagian selatan, utara, maupun barat.

Kemudian pada tahun 2006, UNIFEM memberikan kontribusi dalam proses *Darfur Peace Agreement* (DPA) yang dilaksanakan di Abuja dengan memberikan dukungan kepada seluruh perempuan di Darfur untuk ikut memperjuangkan hak-hak mereka. UNIFEM bekerjasama dengan AU guna menjalankan strateginya terhadap kesetaraan gender. Melalui kerjasama tersebut UNIFEM dan AU membangun strategi berupa upaya mediasi dengan fokus kepada proses perdamaian melalui analisis gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam komite fungsional, serta mengintegrasikan isu-isu mengenai perempuan dalam isi perjanjian damai (Susilawaty, 2014). Dalam pembicaraan yang terjadi di Abuja, UNIFEM mendesak semua pihak agar mempercepat proses perdamaian tersebut

agar dapat memulihkan keamanan dan martabat perempuan yang terkena dampak dari konflik di Darfur. Hadirnya perwakilan dari perempuan-perempuan Darfur dalam perundingan damai tersebut berpengaruh kepada dokumen hasil perundingan damai dan menghasilkan beberapa artikel yang mengacu kepada hak asasi perempuan. Hak-hak yang mereka serukan pada DPA antara lain mengenai pembagian kekayaan dan hak atas tanah, tindakan afirmasi, keamanan fisik, partisipasi perempuan dalam *Disarmament Demobilization and Reintegration* (DDR), dan komisi rekonsiliasi responsif gender (Susilawaty, 2014).

Perempuan-perempuan Darfur yang menjadi korban dari konflik Darfur dan menempati kamp-kamp pengungsian yang tersebar di seluruh wilayah Darfur maupun Sudan membutuhkan perhatian lebih. Selain membutuhkan bantuan medis akibat tindak kekerasan yang terjadi, mereka juga membutuhkan bantuan ekonomi guna menunjang kehidupan mereka. Merespon hal tersebut, UNIFEM membuat program mata pencaharian dengan memberikan pelatihan keterampilan perempuan agar dapat memperoleh sumber penghidupan di kemudian hari. Dalam menjalankan program mata pencaharian ini, konsultan UNIFEM turun langsung ke kamp-kamp pengungsian dengan dibantu oleh tokoh masyarakat disana. UNIFEM juga bekerjasama dengan polisi UNAMID (*United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur*) yang juga memiliki peran dalam pelatihan dan memberikan perlindungan perempuan baik di dalam kamp maupun di luar kamp pengungsian. Tidak mau ketinggalan, UNFPA dan UNDP juga turut memberikan dukungan terhadap program UNIFEM dalam upaya menghentikan tindak kekerasan terhadap perempuan dan meminimalisir dampak dari tindakan tersebut. (Susilawaty, 2014)

Untuk menunjang programnya di Darfur, UNIFEM melakukan kemitraan dengan organisasi-organisasi lokal seperti *Mutanawit*, *Babikar Bandri Scientific Association for Women Studies* dan *Darfur University Peace Centers*. Dengan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi lokal yang ada disana, UNIFEM berupaya untuk meningkatkan pengetahuan yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kapasitas organisasi lokal. UNIFEM juga memberikan pelatihan kepada organisasi-organisasi lokal tersebut mengenai isu gender, penyuluhan keamanan dan perdamaian, serta proses perdamaian dan rekonsiliasi. Dengan kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu dalam menjangkau masyarakat. (Susilawaty, 2014)

Upaya yang dilakukan oleh UNIFEM dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Darfur yang menjadi korban atas konflik yang terjadi di Darfur menghasilkan hasil yang positif terhadap perkembangan perempuan pada akhir programnya. Secara keseluruhan, program "*Protecting and promoting women's rights and leadership in Sudan (2005-2006) and Gender Justice in Sudan (2005-2008)*" telah membawa UNIFEM pada beberapa pencapaian penting, antara lain (Webb, 2008);

- a. UNIFEM telah memperkuat kapasitas pemerintah dan kepolisian PBB untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kamp-kamp pengungsian, mengingat aksi kekerasan yang terjadi sehari-hari adalah ketika para perempuan akan meninggalkan kamp untuk bekerja seperti mencari kayu bakar di hutan.

- b. Berhasil menciptakan ketertarikan antara perempuan di Sudan Utara dan Sudan Selatan untuk membangun perdamaian berkelanjutan dan dialog resolusi konflik. Dalam tahap ini UNIFEM berhasil membawa perempuan Darfur ke forum tingkat tinggi tentang perlindungan perempuan, termasuk kepada Dewan Keamanan PBB.
- c. Mampu bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain seperti UNAMID, UNFPA, dan juga AU dalam membangun solusi berkelanjutan bagi perlindungan perempuan pada konflik Darfur, dan juga mampu bekerjasama dengan masyarakat Darfur untuk menyoroti masalah kekerasan terhadap perempuan dan berupaya memberikan perlindungan perempuan melalui bantuan hukum, kerjasama dengan pemerintah, dan misi perdamaian.
- d. Berhasil meningkatkan kapasitas LSM lokal dengan memberikan penyuluhan serta pelatihan terkait isu gender, keamanan, proses perdamaian, dan rekonsiliasi agar dapat bekerja dalam masyarakat.
- e. UNIFEM memberikan kontribusi yang signifikan bagi proses pembicaraan damai di Darfur pada tahun 2006 dengan berhasil menghadirkan perempuan dalam proses DPA dan menyuarakan hak-hak mereka sendiri sehingga mempengaruhi isi dari perjanjian tersebut.

Program *“Protecting and promoting women’s rights and leadership in Sudan (2005-2006) and Gender Justice in Sudan (2005-2008)”* yang dilaksanakan oleh UNIFEM memang berhasil membuahkan hasil yang positif, namun dianggap belum cukup luas untuk menyoroti kekerasan terhadap perempuan di Darfur. Untuk

itu, UNIFEM membentuk program tambahan yang akan melengkapi program sebelumnya. Program tersebut adalah *“Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur (2008-2010)”*. Program lanjutan ini mengangkat isu mengenai kekerasan terhadap perempuan seperti penyiksaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang merupakan dampak dari perang saudara yang dimulai pada tahun 2003 tersebut. (Okonji, 2011)

2.1.2. Program *“Defending and securing the human rights of women and girls in the humanitarian crisis in Darfur (2008-2010)”*

Dalam menjalankan perannya sebagai aktor dalam menjunjung tinggi hak asasi perempuan, mengatasi kekerasan seksual yang terjadi dalam masa konflik maupun pasca konflik menjadi ciri upaya advokasi UNIFEM. Sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1820 tahun 2008 yang diadopsi oleh UNIFEM mengakui bahwa kekerasan seksual kerap digunakan sebagai strategi perang. Dalam beberapa konteks, kekerasan seksual yang dilakukan pada masa perang dan pasca perang dalam mengancam keamanan dan pembangunan perdamaian (Okonji, 2011). Untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi dalam masa perang maupun pasca perang, membutuhkan pengembangan taktik pasukan penjaga perdamaian PBB dan juga melibatkan perempuan dalam proses perdamaian.

Dalam konflik yang terjadi di Darfur, kekerasan seksual terhadap perempuan atau GBV marak terjadi dan menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi perempuan. Untuk itu, UNIFEM melalui program keduanya *“Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in*

Darfur (2008-2010)” berfokus kepada isu GBV. Program ini memiliki tujuan utama, yaitu (Okonji, 2011);

1. Mengurangi kerentanan perempuan atas aksi GBV dan meningkatkan penegakkan HAM di Darfur Selatan.
2. Memperkuat kinerja dari institusi lokal dan mekanisme kegiatan yang bergerak dalam bidang pengamanan, pertahanan dan juga pemenuhan hak-hak asasi manusia terutama perempuan.
3. Mempromosikan akuntabilitas lembaga-lembaga yang mempunyai peran besar dalam keselamatan, keamanan, serta kehidupan pengungsi perempuan di Darfur.

Program kedua yang dijalankan UNIFEM di Darfur ini merupakan suatu tanggapan dari tingginya angka GBV dan kemiskinan perempuan yang berkaitan dengan sumber penghidupan mereka. Lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Human Rights Watch, UNMIS, UNCHR, UNFPA dan UNICEF banyak melaporkan kasus yang ada di Darfur (Stop Rape Now, 2009). Lembaga-lembaga tersebut melaporkan bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur diperburuk oleh adanya serangan tentara pemerintah (Janjaweed) terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan perempuan dan anak perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan seksual.

UNIFEM menggunakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1320 tahun 2000 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan sebagai dasar dalam melaksanakan perannya untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan baik dalam

amsa konflik maupun pasca-konflik. Sudan merupakan salah satu negara yang menandatangani resolusi ini. Resolusi ini mengakui bahwa diperlukannya undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan secara sepenuhnya baik dalam konflik dan pasca-konflik, serta menyerukan kepada pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi perempuan dari GBV terutama pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lain. Adapun program kerja dari program kedua (2008-2010) UNIFEM di Darfur adalah sebagai berikut (Okonji, 2011);

1. Meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penegakkan dan pengakuan hak perempuan.
2. Meningkatkan perekonomian perempuan dan menciptakan lapangan kerja yang aman dan sesuai.
3. Memasarkan hasil kerajinan pengungsi perempuan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian.
4. Mengadakan dialog dalam meningkatkan pengetahuan serta menciptakan kekompakan antar pengungsi perempuan.
5. Mendapatkan kepercayaan bahwa UNIFEM merupakan organisasi yang efektif dalam melindungi perempuan dan meningkatkan kesadaran atas hak-hak perempuan dalam pelaporan kasus kekerasan.
6. Memberikan pemahaman kepada perempuan yang berada di kamp-kamp pengungsian akan HAM yang seharusnya mereka dapatkan dan memberikan pelatihan dalam penegakkan HAM dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

7. Meningkatkan Lembaga-lembaga masyarakat yang terabaikan.
8. Meningkatkan perlindungan terhadap pengungsi perempuan.
9. Mengurangi terjadinya GBV.

Kesembilan program kerja tersebut terbentuk sebagai respon dari meluasnya dampak GBV pada konflik Darfur. Aksi GBV yang terjadi selama konflik telah menimbulkan luka fisik dan mental, menyebabkan hilangnya mata pencaharian serta kematian bagi masyarakat Darfur khususnya perempuan, dan memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka dan menetap di kamp-kamp pengungsian. Masyarakat yang meninggalkan rumahnya ini bisa disebut dengan *Internally Displaced Person (IDP)*.

Target dari program yang dijalankan oleh UNIFEM ini adalah perempuan dewasa dan perempuan dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual dalam konflik yang terjadi di Darfur. Perempuan di bawah umur (18 tahun kebawah) kerap kali dianggap sebagai perempuan dewasa setelah mereka mengalami masa puber dan mengakibatkan kerentanan perempuan dibawah umur terhadap aksi kekerasan seksual hampir sama dengan perempuan dewasa. Segala bentuk kekerasan seksual merupakan bentuk dari pelanggaran hak mereka atas perlindungan dari kekerasan berbasis gender. (Susilawaty, 2014)

Untuk menunjang programnya, UNIFEM tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Target dana awal dari program "*Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur*" adalah sebesar \$418.000 (Okonji, 2011). Akan tetapi UNIFEM hanya mendapatkan dana

sebesar \$334.970 yang berasal dari kerjasama dengan *Unitarian Universalist Service Committee* (UUSC) yang merupakan sebuah organisasi non-sektarian dengan fokus terhadap kemajuan HAM serta keadilan sosial di Amerika Serikat serta seluruh dunia (UUSC, 2019). Walaupun dana dari hasil kerjasama dengan UUSC berada di bawah dari target dana awal, UNIFEM tidak melakukan penggalangan dana dari pihak lain dengan alasan konteks kemanusiaan dalam konflik Darfur. Selain mendapatkan dana awal, UNIFEM juga kembali menerima dana dari UUSC sebesar \$200.000 pada tahun 2008. Dana yang diberikan oleh UUSC tersebut guna melanjutkan dukungan terhadap program ini untuk periode September 2008 sampai 29 Juli 2010. Selain itu, UNIFEM juga mendapatkan dana tambahan dari UUSD sebesar \$25.000 untuk program kerja tambahan yang pada awalnya tidak dipertimbangkan dalam program ini. UNIFEM dan UUSC sendiri sudah bekerjasama sejak tahun 2007 dalam upaya pemulihan kondisi perempuan di kamp-kamp pengungsian.

Kegiatan yang dilakukan oleh UNIFEM berfokus pada wilayah Darfur Selatan. Pemilihan Darfur Selatan sebagai fokus utama UNIFEM adalah karena wilayah tersebut merupakan wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak yaitu sebanyak 1.185.012 pengungsi. Sedangkan jumlah pengungsi di Darfur Utara hanya sebanyak 521.012 pengungsi dan di Darfur Barat 747.952 pengungsi. Pengungsi-pengungsi tersebut tersebar di beberapa kamp besar seperti kamp Otash dengan jumlah pengungsi sekitar 63.000, kamp Dereige dengan jumlah pengungsi sekitar 25.000, kamp El Sereif lebih dari 20.000 pengungsi dan kamp El Salam lebih dari 10.000 pengungsi (Susilawaty, 2014). Dalam melakukan programnya,

UNIFEM menggunakan strategi konsultasi kelompok dan wawancara secara langsung dengan narasumber (pengungsi perempuan) dalam tahap awal pelaksanaan program. Dalam konsultasi kelompok dan wawancara, UNIFEM dibantu oleh tokoh pemerintah, masyarakat, polisi dari UNAMID, LSM lokal, dan juga perempuan-perempuan dalam kamp pengungsian. Dengan dilakukannya strategi konsultasi kelompok dan wawancara langsung dengan korban GBV, tim ahli dari UNIFEM dapat mengetahui hal-hal penting yang harus dilakukan oleh UNIFEM agar menuai hasil yang positif dalam programnya dan juga diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dapat membatasi perkembangan program.

Tabel 2. Pihak yang terlibat dalam wawancara langsung

Organization Consulted		
No.	Informant for Focused Group Discussions (FGD)	Number involved
1.	Otash IDP Camp	6
2.	Dereige IDP Camp	10
3.	Sekeli IDP Camp	6
4.	El Sereif IDP Camp	8
5.	El Salam IDP Camp	4
6.	Humanity Organization (including Sheikhs)	7
7.	Ehlam Charity Organization	6
8.	GBV Working Group (UNFPA, UNHCR, World Vision, UNAMID, UN Women (UNIFEM))	6

9.	UNAMID (Family Protection and Police in Nyala)	4
10.	UNAMID (Reform and Reconstruction team)	7
11.	Protection Cluster Working Group	10
	Total	74
Direct interviews with key informants		
1.	UN Women (UNIFEM)	7
2.	GoS Police: Unit for family and child protection	2
3.	UNDP Nyala	3
4.	UNDP El Fasher	3
5.	UNFPA	1
6.	FAO	2
7.	UNOCHA	1
8.	Office of Gender Advisor to the Governor	3
9.	General directorate for Women and Family Affairs	1
10.	Joint State Committee for Combating VAW	1
11.	University of Nyala, Peace Centre and Community Development	2
12.	Nahda for Women and Children Development	2
13.	Ehlam Charity Organization	2
14.	PODR	2
15.	El Medina Centre for Gender and Development	1
16.	Kass IDP beneficiaries	3

17.	Former programme coordinator	1
18.	Email interview with UUSC	1
	Total	38
19.	Plenary dialogue at Dereige IDP camp	58 Women, 16 Sheiks

sumber: (Okonji, 2011)

Dalam menjalankan program ini, UNIFEM tidak sendirian, melainkan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga. Adapun lembaga yang melakukan kerjasama dengan UNIFEM dalam program ini diantaranya adalah *African Union* (AU), UNAMID, serta ada juga dari LSM lokal yaitu *Ehlam Charity Organization*, *El-Madina Centre*, *Nahda Women's and Children Development Organization*, dan *People's Organization for Rehabilitation and Development*. Lembaga-lembaga tersebut berfokus kepada kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan perempuan yang ada di Darfur seperti pencegahan GBV, menyuarkan kepemimpinan perempuan, memperbaiki perekonomian, dan upaya mengikutsertakan perempuan dalam proses perdamaian. Kerjasama yang dilakukan oleh UNIFEM dan lembaga-lembaga lain tersebut didirikan dan dikelola secara individual kasus per kasus dan juga tentunya dengan merumuskan ruang lingkup kegiatan, output dari kegiatan, serta keuangan. (Susilawaty, 2014)

Dalam implementasinya, program “*Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur*” yang dicanangkan oleh UNIFEM membuahkan hasil yang positif selama dua tahun periodenya (2008-2010) terkait dengan pemenuhan hak asasi perempuan dan

mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Darfur. Adapun keberhasilan UNIFEM dalam program ini adalah (Susilawaty, 2014);

1. Peningkatan pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka dan kapasitas untuk dapat menikmati hak-hak tersebut

Langkah besar dilakukan oleh UNIFEM guna mengembangkan kapasitas perempuan Darfur dengan melakukan pelatihan dan advokasi mengenai hak asasi manusia, dan juga Gender Based Violence. Dengan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah, masyarakat sipil, serta kepolisian UNIFEM melakukan pelatihan kepada perempuan-perempuan yang berada di kamp pengungsian dan juga kepada mahasiswa. Dalam kerjasamanya dengan LSM lokal seperti *Ehlam Charity Organization, El-Madina Centre, Nahda Women's and Children Development Organization, People's Organization for Rehabilitation and Development, University of Nyala*, dan *State Committee for Combating Violence against Women*, UNIFEM memberikan dukungan dana dan teknis guna nantinya akan digunakan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk menjalankan program peningkatan ekonomi dan pelatihan pencegahan GBV. (Susilawaty, 2014)

Dengan menggunakan LSM lokal, UNIFEM dapat menjangkau keseluruhan masyarakat untuk melakukan peningkatan pemahaman mereka mengenai pentingnya pemenuhan hak asasi mereka. Dalam kerjasama tersebut, UNIFEM berhasil menjangkau sekitar 6.000 orang dari berbagai golongan baik tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aktor hukum, serta sekitar 8.000 siswi tingkat

menengah, Selain itu, penyuluhan juga dilakukan melalui media audio yaitu radio yang dianggap sebagai alat yang relevan dalam menyebarkan isu-isu untuk memberikan perlindungan dan keselamatan perempuan. Melalui radio ini, sekitar 1.500.000 pendengar menerima informasi mengenai GBV dan hak asasi perempuan.

UNIFEM yang bekerjasama dengan UNAMID mendorong partisipasi polisi wanita dalam program pelatihan mengenai isu GBV. Dengan adanya polisi wanita terlatih dan juga polisi relawan, perempuan korban kekerasan seksual dapat melaporkan dan membahas mengenai kekerasan yang mereka alami. Pelatihan ini diberikan kepada 88 polisi pemerintah Sudan, 25 perwira polisi wanita, 1.325 polisi relawan, dan 200 tokoh masyarakat dilatih agar tanggap terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Polisi UNAMID juga ikut memberikan pengawasan dan pelatihan kepada perempuan untuk menjaga keamanan mereka. Polisi UNAMID bertugas untuk memberikan pengawasan terhadap perempuan tiga kali seminggu ketika mereka melakukan perjalanan menuju hutan untuk mencari kayu bakar yang digunakan untuk kebutuhan memasak. Perlindungan yang diberikan ini memunculkan keberanian para perempuan untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpa mereka.

2. *Women's Centre* yang dibangun di kamp-kamp pengungsian terkelola dan terorganisir dengan baik

Women's Centre adalah sebuah aula yang didirikan di kamp-kamp pengungsian dan berfungsi untuk menyediakan forum untuk perempuan berdialog

mengenai GBV, HAM, dan bagaimana mereka dapat memperoleh pendapatan guna menunjang perekonomian mereka. *Women's Centre* yang didirikan oleh UNIFEM ini mendapatkan dukungan dari beberapa mitra UNIFEM seperti IRC, World Vision, UNHCR, UNICEF, UNFPA dan UNAMID. *Women's Centre* membawa dampak positif bagi perempuan Darfur terutama korban selamat dari aksi GBV. Dengan adanya *Women's Centre* tercipta sebuah lingkungan yang nyaman dan aman bagi para perempuan terutama korban GBV. Melalui forum-forum yang disediakan di *Women's Centre*, perempuan-perempuan yang berada di kamp pengungsian bebas berbagi cerita tanpa harus takut dikucilkan oleh masyarakat karena kasus kekerasan seksual yang menimpanya. Komunikasi yang intens antar perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual berguna untuk terus memantau mereka yang mengunjungi *Women's Centre* dan melaporkan kekerasan seksual yang dialami. Selain itu, *Women's Centre* juga menyediakan pelayanan Pendidikan seperti kursus buta huruf dan keterampilan membaca.

3. Pemberdayaan ekonomi perempuan mengalami kemajuan melalui akses terhadap pengetahuan keterampilan, usaha kecil, perdagangan dan pendapatan

Dalam menjalankan program pelatihan untuk membangun perekonomian perempuan, UNIFEM bekerjasama dengan LSM lokal seperti *Ehlam Charity Organization*, *Nahda Women's and Children Development Organization*, dan *People's Organization for Rehabilitation and Development*. Pelatihan yang diberikan kepada perempuan yang berada di kamp-kamp pengungsian berupa bagaimana mengatur usaha skala kecil dan mendapatkan penghasilan dari usaha

kecil tersebut. Beberapa pelatihan keterampilan seperti menjahit, menenun, dan beternak unggas merupakan pelatihan keterampilan dasar yang diberikan agar perempuan mendapatkan pendapatan alternatif selain mencari kayu bakar yang membuka peluang bagi mereka mendapatkan tindak kekerasan seksual.

Data menyebutkan bahwa sekitar 295 perempuan yang berada di kamp-kamp pengungsian berhasil mengakses layanan keuangan. Sementara itu, sekitar 400 perempuan yang berada di kamp El-Salam dan Otash mendapatkan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan seperti pemasaran dan pengaturan biaya produksi. Disamping itu, UNIFEM membeli tanah di kota Nyala untuk membangun 100 warung yang akan digunakan perempuan sebagai pasar (Susilawaty, 2014). Pembentukan pasar tersebut bertujuan agar para perempuan terus mengasah dan mempraktekkan keterampilan mereka untuk mendapatkan penghasilan dan menjauhkan mereka dari aksi kekerasan seksual. Pemberian pelatihan keterampilan dan membangun pasar untuk perempuan merupakan langkah yang dilakukan UNIFEM untuk pemulihan kondisi perempuan pasca-konflik. Karena, selain dampak fisik dan mental, perekonomian perempuan di Darfur juga terganggu karena sulitnya menjalankan aktifitas mencari nafkah di luar kamp pengungsian akibat dari tindak kekerasan seksual yang terus membuntuti perempuan-perempuan di Darfur.

Hal positif lain yang telah dicapai UNIFEM adalah penguatan kapasitas kelembagaan sehingga keselamatan perempuan yang berada di kamp-kamp pengungsian terbukti membaik. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya keamanan serta peningkatan kapasitas pengungsi perempuan dalam kepemimpinan

dan partisipasi dalam proses perdamaian. Hasil-hasil yang sudah dicapai UNIFEM melalui program-programnya membuktikan bahwa hadirnya aktor organisasi internasional seperti UNIFEM dapat berperan penting dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Darfur.

